

PJ WALI KOTA KENDARI SAMPAIKAN CAPAIAN STRATEGIS PEMKOT



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/1186981/pj-wali-kota-kendari-sampaikan-capaian-strategis-pemkot>

KBRN, Kendari: Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup memaparkan berbagai capaian strategis Pemerintah Kota Kendari selama Triwulan IV 2024 dalam Agenda Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kota Kendari Triwulan IV Tahun 2024, berlangsung di Kantor Sekretariat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Evaluasi ini dipimpin oleh Plt. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimiyathi. Pj. Wali Kota melaporkan inflasi Kota Kendari pada November 2024 mencapai 0,79 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 1,55 persen Program seperti Gerakan Pangan Murah di 50 titik dan pengawasan harga di pasar tradisional secara rutin disebut sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam upaya mendukung program bapak Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.

Kemudian, angka stunting di Kota Kendari menunjukkan penurunan drastis dari 25,7 persen pada tahun 2023 menjadi hanya 2,01 persen pada Oktober 2024. Pemerintah melaksanakan berbagai program intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT), bantuan pangan bergizi, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pemerintah Kota Kendari juga berhasil menangani 421 jiwa (107 KK) yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Program bantuan sosial non-tunai, bantuan langsung, dan intervensi lintas sektor lainnya berhasil mengatasi sebagian besar persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

Selanjutnya, Kota Kendari kini memiliki 178 dokter spesialis, 16 rumah sakit, dan 15 puskesmas berstatus BLUD. Pembangunan gedung perawatan kanker dan jantung, serta pengadaan alat kesehatan seperti CT-Scan dan ESWL, menjadi bagian dari peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari menyediakan 257 layanan terintegrasi dengan konsep “One Day Service”. Masyarakat dapat menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi secara cepat melalui aplikasi digital seperti OSS dan SICANTIK.

Berbagai proyek unggulan, termasuk revitalisasi Pasar Rakyat Wua-Wua, penataan pedestrian, dan pengembangan wisata bahari, menunjukkan progres fisik hingga 95 persen. Langkah ini bertujuan mempercantik wajah kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebanyak 620 pencari kerja dan 76 kelompok UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi halal, serta pendampingan akses pasar. Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

"Capaian ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak, dan kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kendari melalui program yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya. Muhammadi Yusup.

Para Inspektur, Auditor dan PPUPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri selaku evaluator menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Kota Kendari yang menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor. “Keberhasilan ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu evaluator.

Pj Wali Kota juga menyampaikan rencana strategis untuk tahun 2025, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kemajuan Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1186981/pj-wali-kota-kendari-sampaikan-capaian-strategis-pemkot/>, “Pj Wali Kota Kendari Sampaikan Capaian Strategis Pemkot” tanggal 12 Desember 2024.
2. <https://haluansultra.id/2024/12/12/pemkot-kendari-paparkan-capaian-kinerja-triwulan-iv-2024/>, “Pemkot Kendari Paparkan Capaian Kinerja Triwulan IV 2024”, tanggal 12 Desember 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Pasal 1 menyatakan bahwa, “Definisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)”.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa, “Ruang lingkup LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD”.
3. Pasal 4 menyatakan bahwa, “LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan”.
4. Pasal 5 menyatakan bahwa, “Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari capaian kinerja makro, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan akuntabilitas kinerja”.
5. Pasal 6 menyatakan bahwa, “Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan”.
6. Pasal 10 menyatakan bahwa, “Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri”.
7. Pasal 11 menyatakan bahwa, “Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri”
8. Pasal 12 menyatakan bahwa, “LPPD digunakan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja”.